

Judul : Marak perdagangan orang, cegah pengiriman pekerja ilegal  
Tanggal : Minggu, 31 Agustus 2025  
Surat Kabar : Rakyat Merdeka  
Halaman : 3

## Marak Perdagangan Orang Cegah Pengiriman Pekerja Ilegal



Rinto Subekti

WAKIL Ketua Komisi XIII DPR Rinto Subekti meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat guna mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Masyarakat yang bekerja ke luar negeri wajib berangkat melalui jalur resmi agar terhindar dari risiko perdagangan manusia.

"Semua pemangku kepentingan wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kerja di luar negeri yang sesuai prosedur," ujarnya, usai kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumut di Medan, Kamis (28/8/2025).

Dengan sosialisasi yang tepat, masyarakat dapat bekerja di luar negeri secara legal, sehingga tidak lagi menjadi pekerja atau imigran ilegal yang rawan menjadi korban TPPO. Selain itu, perlu kesadaran kolektif dari DPR, Kementerian Imigrasi, hingga Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menangkal praktik ilegal.

Rinto juga mengapresiasi inisiatif Imigrasi Sumut yang membentuk desa binaan sebagai sarana edukasi masyarakat. Program ini memberikan pemahaman mengenai prosedur pembuatan paspor dan visa resmi, sekaligus menjadi

benteng awal pencegahan.

"Desa binaan memiliki peran krusial dalam memastikan warga berangkat melalui jalur resmi. Dengan begitu, risiko menjadi korban TPPO atau terjebak eksploitasi dapat diminimalisir. Ini langkah proaktif yang patut didukung penuh," tegas legislator Demokrat asal Dapil Jawa Tengah IV itu.

Anggota Komisi XIII DPR Maruli Siahaan menekankan perlunya pengetatan mekanisme penerbitan paspor. Praktik pemberangkatan pekerja migran masih kerap dimanfaatkan pihak tertentu dengan memanipulasi data dan administrasi.

"Supaya jangan ada kejadian lagi, penertiban paspor harus sesuai persyaratan," kata politikus Partai Golkar itu.

Maruli bilang, setiap proses harus dijalankan dengan hati-hati dan objektif. Data harus diverifikasi langsung, calon pekerja dipanggil, serta tujuan keberangkatan dipastikan jelas sebelum keputusan diberikan.

Dia juga menekankan bahwa surat persetujuan orang tua merupakan syarat mutlak bagi calon pekerja migran.

"Pengawasan lebih ketat sangat diperlukan untuk memastikan setiap permohonan paspor berjalan sesuai prosedur dan tidak dimanfaatkan sindikat TPPO," tegas purnawirawan Polri berpangkat Kombes tersebut.

DPR, lanjut Maruli, juga mendorong Pemerintah memperkuat kerja sama lintas sektoral dalam menangani TPPO. Sinergi ini melibatkan Polri, Dinas Tenaga Kerja, hingga Pemda agar penanganan lebih efektif.

Tingginya kasus TPPO di Sumut turut menjadi perhatian Komnas HAM. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengungkapkan pihaknya turun langsung ke Sumut untuk mengumpulkan data mengenai langkah yang dilakukan Pemprov dalam pencegahan dan penanganan kasus. ■ PYB